BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisa Deskriptif

Penelitian ini dilakukan pada 6 SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) penghasil di kota Bandung. Selama 5 periode, dari tahun 2011 sampai tahun 2015 meliputi DPP Kebakaran, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Sebelum membahas pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan, terlebih dahulu akan dibahas gambaran data Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan selama periode 2011-2015. Data yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini berupa data sekunder, karena merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Bandung.

4.1.1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di Kota Bandung tahun 2011-2015

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".

Menurut Ahmad Yani (2015:51) juga menyebutkan bahwa:

> "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sedangkan menurut Muhammad Fauzan (2006:235) yakni:

"Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah".

Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang dipungut dari dalam wilayahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berasal dari sumber ekonomi asli daerahnya.

Sejalan dengan Erlina dan Rasdianto (2013:93) yang menjelaskan kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

1. "Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah".

Diatas diketahui bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Maka dari itu dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur pendapatan asli daerah adalah Total Pendapatan Asli Daerah (Total PAD).

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015 (dalam Rupiah)

TAHUN	2011	2012	2013	2014	2015
DISHUB	217,050,000	8,175,955,500	18,841,774,540	19,193,065,800	18,478,504,320
DISPORA	449,612,000	131,566,850	978,654,750	2,435,759,557	1,562,921,575
BPPT	35,382,415,296	50,548,169,496	78,178,299,725	52,330,616,242	31,301,966,107
DISKAR	387,666,500	409,772,300	592,663,460	533,957,100	810,208,600
DISDUKCAPIL	217,050,000	259,255,000	1,612,200,000	2,249,325,000	2,473,350,000
DISPERTAPA	971,711,750	850,362,250	1,293,910,000	1,583,604,500	1,768,477,000
RATA-RATA	**6,270,917,591**	**10,062,513,566**	**16,916,250,413**	**13,054,388,033**	**9,399,237,934**
Maksimum	**35,382,415,296**	**50,548,169,496**	**78,178,299,725**	**52,330,616,242**	**31,301,966,107**
Minimum	**217,050,000**	**131,566,850**	**592,663,460**	**533,957,100**	**810,208,600**
Perkembangan		**38%**	**41%**	**-30%**	**-39%**

Sumber: (data diolah 2017)

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa:

1. Pada tahun 2011 rata-rata Pendapatan Asli Daerah dari 6 SKPD yang dijadikan sampel yaitu Rp 6,270,917,591. Dimana Pendapatan Asli Daerah tertinggi diperoleh Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 35,382,415,296. Sedangkan untuk perolehan Pendapatan Asli Daerah terendah didapat oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 217,050,000.
2. Pada tahun 2012 rata-rata Pendapatan Asli Daerah dari 6 SKPD yang dijadikan sampel yaitu Rp 10,062,513,566 atau naik 38% dari tahun sebelumnya. Adapun nilai Pendapatan Asli Daerah tertinggi pada tahun 2012 didapat oleh Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah Rp 50,548,169,496. Sedangkan SKPD

dengan PAD terendah adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) dengan PAD senilai Rp 131,566,850.

3. Pada tahun 2013 rata-rata Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp 16,916,250,413 atau naik 41% dari rata-rata Pendapatan Asli Daerah tahun 2012. SKPD dengan perolehan PAD tertinggi adalah Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) senilai Rp 78,178,299,725. Sedangkan SKPD dengan PAD terendah adalah DPP Kebakaran (DISKAR) dengan nilai PAD sebesar Rp 592,663,460.
4. Pada tahun 2014 rata-rata Pendapatan Asli Daerah turun sebesar 30% dari angka tahun 2013. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah tercatat sebesar Rp 13,054,388,033. SKPD dengan perolehan PAD tertinggi adalah Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) dengan PAD sebesar Rp 52.330.626.242. Dan SKPD dengan perolehan PAD terendah adalah DPP Kebakaran (DISKAR) dengan perolehan PAD sebesar Rp 533.597.100.
5. Pada akhir tahun 2015 rata-rata Pendapatan Asli Daerah kembali turun dari angka tahun 2014 yaitu sebesar Rp 9.399.237.934 atau turun 39% dari tahun sebelumnya. SKPD dengan perolehan PAD tertinggi adalah Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) dengan perolehan PAD sebesar Rp 31,301,966,107. Dan SKPD dengan perolehan PAD terendah adalah DPP Kebakaran (DISKAR) dengan perolehan PAD sebesar Rp 810.208.600.

Berikut tabel statistik deskriptif Pendapatan Asli Daerah dari 6 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015.

Tabel 4.2
***Descriptive Statistics* Pendapatan Asli Daerah**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	30	131566850.00	78178299725.00	11140661507.2667	19546162425.00870
Valid N (listwise)	30				

Sumber: (data diolah 2017)

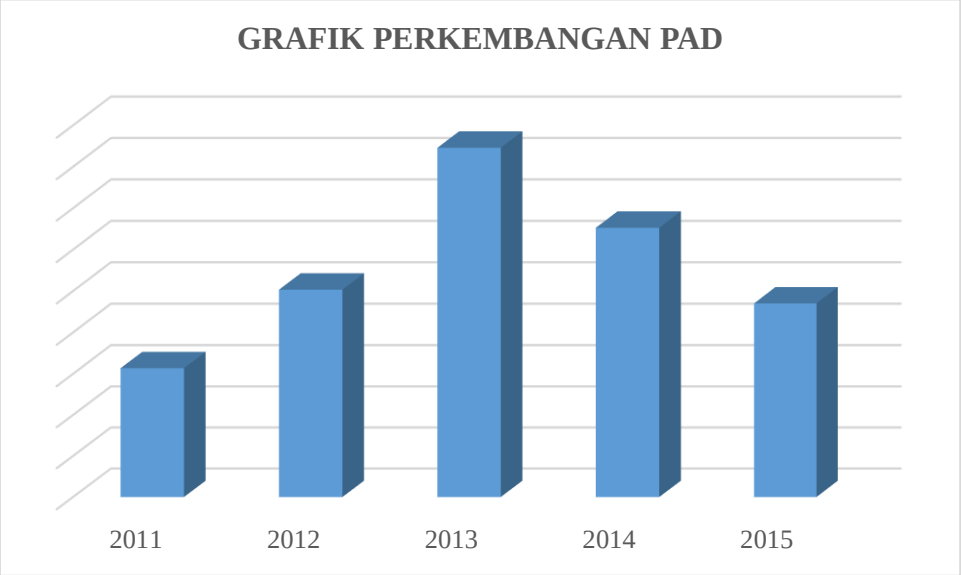
Tabel output di atas menjelaskan statistik deskriptif mengenai Pendapatan Asli Daerah pada 6 SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) penghasil di kota Bandung. Selama 5 periode, dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Pada tabel output di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah SKPD pengahasil kota Bandung adalah sebesar Rp 11,140,661,507 dengan nilai simpangan baku sebesar Rp 19,546,162,425. Nilai Pendapatan Asli Daerah tertinggi mencapai Rp 78,178,299,725 dimiliki oleh Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) pada tahun 2013, sedangkan Pendapatan Asli Daerah terendah mencapai Rp. 131566850.00 dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) tahun 2012.

Tabel 4.3
Rata-Rata Pendapatan Asli Daerah pada 6 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015
(dalam Jutaan Rupiah)

Pendapatan Asli Daerah	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Rata-Rata	6.271	10.000	16.916	13.054	9.399
Perkembangan	-	38%	41%	-30%	-39%

Sumber: (data diolah 2017)

Untuk mengetahui lebih detail mengenai perkembangan rata-rata Pendapatan Asli Daerah pada 6 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dan gambar grafik di bawah ini:



Gambar 4.1
Grafik Perkembangan Rata-Rata Pendapatan Asli Daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa rata-rata nilai Pendapatan Asli Daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung memiliki *trendline* yang fluktuatif setiap tahunnya. Meskipun rata-rata Pendapatan Asli Daerah sempat naik pada tahun 2013 secara signifikan tetapi kembali turun pada dua tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2014 dan 2015.

4.1.1.2 Perkembangan Belanja Modal pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015

Belanja Modal menurut Halim dan Kusufi (2012:107) adalah:

> "Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi".

Menurut Bachtiar Arif (2009:188) menyatakan bahwa:

> "Belanja modal merupakan belanja yang tidak habis satu tahun dan menghasilkan aset tetap pemerintah".

Sedangkan menurut Dedi Nordiawan (2010:50) yakni:

> "Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran oprasional untuk biaya pemeliharaan".

Dari ketiga pengertian diatas diketahui bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang meberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintahan untuk biaya pemeliharaan.

Sejalan dengan Halim dan Kusufi (2012:107) bahwa belanja modal di kelompokkan berdasarkan:

1. "Belanja tanah.
2. Belanja peralatan dan mesin.
3. Belanja modal gedung dan bangunan.
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.
5. Belanja aset tetap lainnya".

Berdasarkan penjelasan diatas, maka indikator belanja modal yang akan diukur dalam penelitian ini adalah Total Belanja Modal.

Tabel 4.4
Belanja Modal pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015 (dalam Rupiah)

TAHUN	2011	2012	2013	2014	2015
DISHUB	1,514,319,725	15,728,950,928	30,852,847,210	53,719,805,150	88,913,070,676
DISPORA	5,220,755,610	3,465,177,036	4,790,272,444	7,456,170,700	51,871,768,378
BPPT	516,188,640	1,595,880,780	1,207,694,750	1,664,360,450	3,743,315,360
DISKAR	1,481,321,719	4,644,141,985	4,537,164,610	10,211,139,410	8,062,809,980
DISDUKCAPIL	1,514,319,725	1,907,619,400	1,600,050,650	1,715,101,803	987,409,970
DISPERTAPA	1,376,025,500	2,145,225,160	2,044,640,320	4,122,744,846	6,102,999,660
Maksimum	**5,220,755,610**	**15,728,950,928**	**30,852,847,210**	**53,719,805,150**	**88,913,070,676**
Minimum	**516,188,640**	**1,595,880,780**	**1,207,694,750**	**1,664,360,450**	**987,409,970**
RATA-RATA	**1,937,155,153**	**4,914,499,215**	**7,505,444,997**	**13,148,220,393**	**26,613,562,337**
Perkembangan		**61%**	**35%**	**43%**	**51%**

Sumber: (data diolah 2017)

Dari data Tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa:

1. Pada tahun 2011 yang digunakan sebagai dasar penelitian, rata-rata belanja modal pada 6 SKPD yang dijadikan sampel penelitian tercatat sebesar Rp 1,937,155,153. Adapun SKPD dengan tingkat belanja modal tertinggi adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) sebesar Rp 5,220,755,610. Sedangkan SKPD dengan belanja modal terendah adalah Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) dengan belanja modal sebesar Rp 516,188,640.
2. Pada tahun 2012 nilai rata-rata belanja modal pada SKPD penghasil kota Bandung mengalami kenaikan sebesar 61% dari angka tahun 2011, yaitu berada diangka Rp 4,914,499,215. SKPD dengan nilai belanja modal tertinggi pada tahun 2012 adalah Dinas Perhubungan (DISHUB) dengan nilai belanja modal sebesar Rp 15,728,950,928. Sedangkan SKPD dengan nilai Belanja modal terendah adalah Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) dengan nilai belanja modal sebesar Rp 1,595,880,780.
3. Pada tahun 2013 rata-rata belanja modal SKPD penghasil di kota Bandung adalah Rp 7,505,444,997, angka ini naik dari tahun 2012 sebesar 35%. Adapun SKPD dengan nilai belanja modal tertinggi adalah Dinas Perhubungan (DISHUB) dengan nilai belanja modal mencapai Rp 30,852,847,210. Sedangkan SKPD dengan nilai belanja modal terendah adalah Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) sebesar Rp 1,207,694,750.

4. Pada tahun 2014 rata-rata belanja modal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil pada kota Bandung adalah Rp 13,148,220,393. Angka ini naik 43% dari angka tahun 2013. SKPD dengan nilai belanja modal tertinggi adalah Dinas Perhubungan (DISHUB) dengan nilai belanja modal mencapai Rp 53,719,805,150. Sedangkan SKPD dengan Nilai belanja modal terendah adalah Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) dengan nilai belanja modal mencapai Rp 1,664,360,450.
5. Pada tahun 2015 sebagai periode akhir penelitian, nilai rata-rata belanja modal pada SKPD penghasil di kota Bandung adalah Rp 26,613,562,337. Angka ini naik dari angka tahun 2014 sebesar 51%. SKPD dengan nilai belanja modal tertinggi adalah Dinas Perhubungan (DISHUB) sebesar Rp 88,913,070,676. Adapun SKPD dengan nilai belanja modal terendah adalah Dinas Kependudukan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) sebesar Rp 987,409,970.

Berikut tabel statistik deskriptif Belanja Modal pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015.

Tabel 4.5
***Descriptive Statistics* Belanja Modal**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	30	516188640.00	88913070676.00	10823776419.1667	19998975307.85393
Valid N (listwise)	30				

Sumber: (data diolah 2017)

Tabel *output* di atas menjelaskan statistik deskriptif mengenai Belanja Modal pada pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015. Pada tabel *output* di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-

rata Belanja Modal pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung adalah sebesar Rp 10.823.776.419. Dengan nilai simpangan baku sebesar Rp 19.998.975.307. Nilai Belanja Modal tertinggi mencapai Rp 88.913.070.676 dimiliki Dinas Perhubungan (DISHUB) pada tahun 2014, sedangkan Nilai belanja modal terendah adalah Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) pada tahun 2011.

Tabel 4.6
Rata-Rata Belanja Modal pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015
(Dalam Jutaan Rupiah)

Belanja Modal	2011	2012	2013	2014	2015
Rata-Rata	1,937	4,914	7,505	13,148	26,613
Perkembangan	-	61%	35%	43%	51%

Sumber: (data diolah 2017)

Untuk mengetahui lebih detail tentang perkembangan rata-rata Belanja Modal pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015, dapat dilihat di grafik berikut ini:



Gambar 4.2
Grafik Perkembangan Belanja Modal pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015

Dari data grafik diatas dapat dilihat bahwa selama perioode tahun 2011-2015 rata-rata Belanja Modal pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung Cenderung memiliki tren yang terus naik. Dimana nilai rata-rata terendah adalah pada tahun 2011 dan rata-rata tertinggi adalah tahun 2015.

4.1.1.3 Perkembangan Kinerja Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015

Menurut Wibowo (2014:7) kinerja yaitu:

"Kinerja berasal dari pengertian *performance.* Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja".

Kinerja keuangan menurut Fahmi (2012:2) adalah:

"Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan banar".

Sedangkan menurut Rudianto (2013:189) kinerja keuangan merupakan:

"Hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan".

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah menurut Halim (2008:24) yakni:

"Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah".

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah menurut Sucipto (2011:36) didefiniskan sebagai berikut:

> "Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang- undangan selama satu periode anggaran".

Dari ketiga pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah ukuran untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dengan mengacu pada kebijakan dan ketentuan perundang-undangan.

Pada variable kinerja keuangan, indicator yang digunakan adalah dengan cara menghitung rasio efisiensi rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2012:6)

Tabel 4.7
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mohamad Mahsun (2012:187)

Tabel 4.8
Kinerja Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015
(dalam Persen)

TAHUN	2011	2012	2013	2014	2015
DISHUB	207.73	654.49	435.38	592.75	857.31
DISPORA	2,691.96	14,266.52	2,164.31	2,362.42	7,573.69
BPPT	26.66	28.31	24.32	39.27	99.78
DISKAR	3,944.72	4,804.71	3,812.11	6,025.78	4,097.48
DISDUKCAPIL	5,148.02	6,016.76	865.48	719.68	669.16
DISPERTAPA	1,861.75	2,211.26	1,568.27	2,221.78	2,117.51
Maksimum	**5,148.02**	**14,266.52**	**3,812.11**	**6,025.78**	**7,573.69**
Minimum	**26.66**	**28.31**	**24.32**	**39.27**	**99.78**
RATA-RATA	**2,313**	**4,664**	**1,478**	**1,994**	**2,569**
perkembangan		**50%**	**-215%**	**26%**	**22%**

Sumber: (data diolah 2017)

Dari Tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada tahun 2011 dimana tahun tersebut menjadi tahun dasar penelitian adapun rata-rata dari Kinerja Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung yaitu sebesar 2.313%, adapun SKPD dengan nilai kinerja keuangan tertinggi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) yaitu sebesar 5.148%. sedangkan SKPD dengan nilai kinerja keuangan terendah adalah Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) dengan nilai kinerja sebesar 26.66%
2. Pada tahun 2012 rata-rata dari Kinerja Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung yaitu 4.664% Atau meningkat 50% dari tahun sebelumnya. Adapaun SKPD dengan nilai kinerja keuangnan terbesar pada tahun 2012 adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) sebesar 14.266%. sedangkan SKPD dengan nilai kinerja

keuangan terendah adalah Dinas Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) sebesar 26.66%.

3. Pada tahun 2013 rata-rata dari Kinerja Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung yaitu 1.748%, angka ini turun -215% dari angka tahun sebelumnya. SKPD dengan nilai kinerja keuangan tertinggi adalah DPP Kebakaran (DISKAR) dengan nilai kinerja keuangan sebesar 3.812%. Sedangkan SKPD dengan nilai kinerja keuangan terendah adalah Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) dengan nilai kinerja keuangan sebesar 24.32%.
4. Pada tahun 2014 dari Kinerja Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung yaitu sebesar 1.994%. angka ini naik 26% dari angka tahun sebelumnya. Adapaun SKPD dengan nilai kinerja keuangan tertinggi adalah DPP Kebakaran (DISKAR) dengan nilai kinerja keuangan mencapai 6.025%. Sedangkan SKPD dengan nilai kinerja keuangan terendah adalah Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) yang hanya sebesar 39.21%.
5. Pada tahun 2015 rata-rata dari Kinerja Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung yaitu 2.569%. angka ini naik 22% dari angka tahun 2014. Adapun SKPD dengan nilai belanja modal tertinggi adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) dengan nilai kinerja keuangan sebesar 7.574%. Sedangkan SKPD dengan nilai kinerja keuangan terendah adalah Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) dengan nilai kinerja keuangan sebesar 100%.

Berikut tabel statistik deskriptif Belanja Modal pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015.

Tabel 4.9

***Descriptive Statistics* Kinerja Keuangan**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
kinerja_keuangan	30	24.32	14266.52	2603.6457	3038.42892
Valid N (listwise)	30				

Sumber: (data diolah 2017)

Tabel *output* di atas menjelaskan statistik deskriptif mengenai Kinerja Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015. Pada tabel *output* di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Kinerja Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung adalah sebesar 2604% dengan nilai simpangan baku sebesar 3038%. Nilai Kinerja Keuangan tertinggi mencapai 14266% didapat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) pada tahun 2012, sedangkan Kinerja Keuangan terendah mencapai 24% didapat oleh Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) pada tahun 2013.

Tabel 4.10
Rata-Rata Kinerja Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015
(Dalam Persen)

Kinerja Keuangan	2011	2011	2012	2013	2014
Rata-Rata	2.313	4.664	1.478	1994	2.569
Perkembangan		50%	-215%	26%	22%

Sumber: (data diolah 2017)

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perkembangan Kinerja Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 4.3
Grafik Perkembangan Kinerja Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung Selama 2011-2015

Dari data grafik diatas dapat dlihat bahwa rata-rata Kinerja Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di kota Bandung mengalami fluktuasi sepanjang periode penelitian tahun 2011 sampai dengan 2015 dimana rata-rata Kinerja Keuangan tertinggi yaitu pada tahun 2012 sedangkan rata-rata Kinerja Keuangan terendah pada tahun 2013.

4.1.2 Analisis Verifikatif

Setelah diuraikan gambaran perkembangan pada masing-masing variable penelitian. Selanjutnya diuji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan. Pengujian akan dilakukan melalui beberapa tahapan pengujian. Yaitu terdiri dari, koefisien korelasi, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Namus, sebelum dilakukan ketiga pengujian tersebut terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda.

Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* IBM *SPSS* v23.0.

4.1.2.1 Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung tahun 2011-2015)

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk menguji keshahihan atau keabsahan hasil estimasi model regresi. Beberapa asumsi klasik yang terpenuhi agar kesimpulan dari hasil regresi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

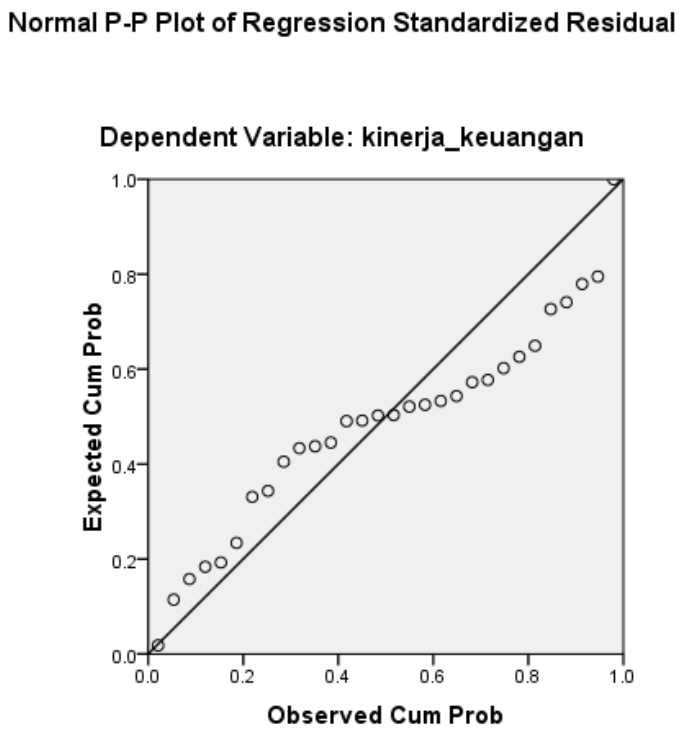
4.1.2.2 Uji Asumsi Klasik

Tahapan pertama dalam melakukan analisis regresi linier berganda adalah pemeriksaan terhadap asumsi normalitas, multikolinearitas pada variabel bebas, heteroskedastisitas dan autokorelasi pada data yang mengandung unsur deret waktu *(time series)*. Pengujian asumsi-asumsi tersebut dilakukan supaya menghasilkan estimasi regresi yang *BLUE (Best Linear Unbiased Estimated)*.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah residu (variabel penganggu) dalam sebuah model regeresi berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki residu yang berdistribusi secara normal. Secara visual, deteksi normalitas dapat dilihat pada grafik *normal probability plots*, dimana jika titik menyebar disekitar garis dan mengikuti arah

garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa residu dalam model berdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh grafik sebagai berikut:



Gambar 4.4
Grafik *Normal Probability Plots*

Pada gambar grafik normal probability plots di atas, terlihat titik yang ada menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hal tersebut menunjukkan bahwa residu dalam model regresi berdistribusi secara normal. Untuk memperkuat hasil uji normalitas secara visual di atas, maka dapat dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika probabilitas > 0,05 dapat disimpulkan bahwa residu dalam model berdistribusi secara normal. Dengan menggunakan program *SPSS* 23.0, diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4.11
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.41575085E3
Most Extreme Differences	Absolute	.179
	Positive	.179
	Negative	-.135
Kolmogorov-Smirnov Z		.981
Asymp. Sig. (2-tailed)		.291

a. Test distribution is Normal.
Sumber: (data diolah 2017)

Pada tabel *output SPSS* di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas yang diperoleh adalah sebesar 0,291 > 0,05 sehingga sesuai dengan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa residu dalam model regresi berdistribusi secara normal, maka model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas dalam suatu model regresi linier saling berkorelasi kuat dengan variabel bebas lainnya. Model regresi yang baik harusnya terbebas dari adanya multikolinearitas. Untuk mendeteksi masalah multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *VIF*. Jika nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai *VIF* < 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam model regresi terbebas dari adanya multikolinearitas. Dengan menggunakan program *SPSS* 23.0, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12
Pengujian Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah	.780	1.282
	Belanja Modal	.780	1.282

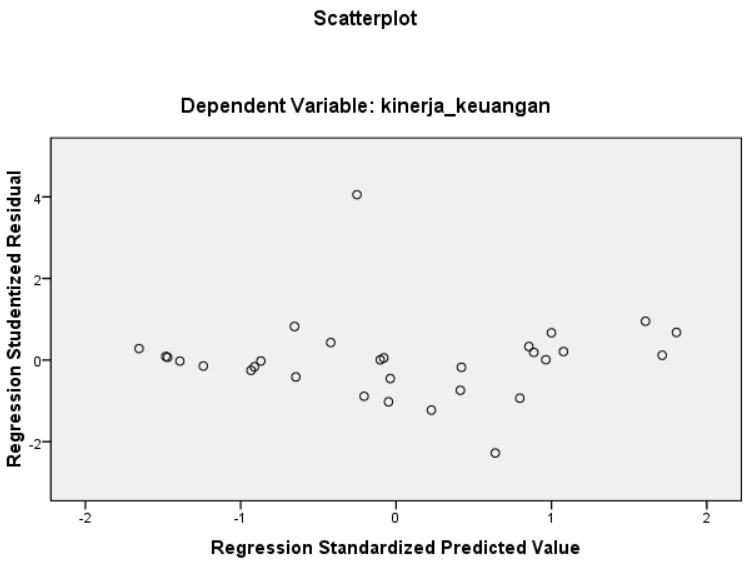
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: (data diolah 2017)

Pada tabel *output SPSS* di atas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh untuk kedua variabel bebas adalah sebesar 0,780 > 0,1 dengan nilai *VIF* sebesar 1.282 < 10. Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel bebas dalam model terbebas dari masalah multikolinearitas, sehingga model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik seharusnya terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Secara visual, heteroskedastisitas dapat dideteksi pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik tersebar secara acak di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Dengan menggunakan program *SPSS* 23.0, diperoleh grafik sebagai berikut:



Gambar 4.5
Grafik *Scatterplot*

Pada gambar grafik *scatterplot* di atas, terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik yang ada tersebar secara acak, di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah heteroskedastisitas, sehingga model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antar variabel pengganggu (ε) pada data yang mengandung unsur deret waktu *(time series).* Model regresi yang baik seharusnya terbebas dari adanya autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi dapat dilihat dari nilai *Durbin-Watson.*

jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 < DW < +2, dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi. Dengan menggunakan program *SPSS* 23.0, diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4.13
Pengujian Autokorelasi
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.746[a]	.557	.524	1467.249	1.265

a. Predictors: (Constant), BM, PAD

b. Dependent Variable: kinerja_keuangan

Sumber: (data diolah 2017)

Pada tabel output SPSS di atas, diketahui bahwa nilai Durbin-Watson yang diperoleh adalah sebesar 1.265 dan berada diantara -2 dan +2 atau -2 < DW < +2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari adanya autokorelasi, sehingga model regresi telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

4.1.2.3 Estimasi Regresi Linier Berganda

Dengan menggunakan program *SPSS* 23.0, diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4.14
Estimasi Regresi Linier Berganda antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan
Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13.330	4110.779		3.243	.003
Pendapatan Asli Daerah	-1.416	378.491	-.543	-3.740	.001
Belanja Modal	.191	87.290	.317	2.188	.037

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: (data diolah 2017)

Tabel di atas memberikan informasi mengenai hasil estimasi regresi linier berganda antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan. Pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai konstanta (*a*) yang diperoleh adalah sebesar 13330.137 dengan nilai koefisien regresi (β_i) sebesar -1.416 X_1; 191

X_2. Berdasarkan pada nilai-nilai yang diperoleh, dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 13.330 + -1.416\ X_1 + 191\ X_2}$$

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta sebesar 13.330, menunjukan besarnya Kinerja Keuangan, jika Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal bernilai 0.
b. Koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar -1.416 X_1 dan bertanda negatif, artinya setiap terjadi peningkatan 1 satuan pada Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal bernilai konstan, diprediksikan mampu menurunkan Kinerja Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung sebesar 1.416 miliar rupiah.
c. Koefisien regresi untuk Belanja Modal sebesar 191 X_2 dan bertanda positif, artinya setiap terjadi peningkatan 1 satuan pada Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah bernilai konstan, diprediksikan mampu meningkatkan Kinerja Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung sebesar 0.191 miliar rupiah.

4.1.2.4 Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi merupakan nilai yang menunjukan derajat asosiasi (keeratan hubungan) yang terjadi antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

a. Koefisien Korelasi Parsial antara Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Dengan menggunakan program SPSS 23.0, diperoleh hasil korelasi parsial sebagai berikut:

Tabel 4.15
Koefisien Korelasi Parsial antara Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Correlations

Control Variables			PAD	kinerja_keuangan
BM	PAD	Correlation	1.000	-.584
		Significance (2-tailed)	.	.001
		df	0	27
	kinerja_keuangan	Correlation	-.584	1.000
		Significance (2-tailed)	.001	.
		df	27	0

Sumber: (data diolah 2017)

Pada tabel *output SPSS* di atas, terlihat bahwa nilai korelasi parsial antara Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan adalah sebesar -0,584 dan termasuk dalam kategori korelasi yang sedang berada pada interval korelasi antara "0,40 – 0,599". Nilai korelasi bertanda negatif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah berlawanan arah, artinya semakin besar Pendapatan Asli Daerah, maka semakin rendah Kinerja Keuangan. Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan negatif yang sedang antara Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung.

b. Koefisien Korelasi Parsial antara Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Dengan menggunakan program *SPSS* 23.0, diperoleh hasil korelasi parsial sebagai berikut:

Tabel 4.16
Koefisien Korelasi Parsial antara Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Correlations

Control Variables			BM	kinerja_keuangan
PAD	BM	Correlation	1.000	.388
		Significance (2-tailed)	.	.037
		df	0	27
	kinerja_keuangan	Correlation	.388	1.000
		Significance (2-tailed)	.037	.
		df	27	0

Sumber: (data diolah 2017)

Pada tabel *output SPSS* di atas, terlihat bahwa nilai korelasi parsial antara tingkat Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan adalah sebesar 0,388 dan termasuk dalam kategori korelasi yang rendah berada pada interval korelasi antara "0,20 – 0,399". Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin tinggi Belanja Modal, maka semakin tinggi pula Kinerja Keuangan perusahaan. Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan positif yang rendah antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung.

4.1.2.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan nilai yang menunjukan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh secara parsial, diperoleh dari hasil perkalian antara nilai *Beta* dengan *Zero-Order*. *Beta* merupakan nilai koefisien regresi yang terstandarkan *(standardized coefficients)*, sedangkan *Zero-Order* merupakan nilai korelasi parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan bantuan program *SPSS* 23.0, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.17
Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations	Partial Coefficient of Determination
		Beta	Zero-order	
1	*Pendapatan Asli Daerah*	-.543	-.691	37%
	Belanja Modal	.317	.572	18%
Total Effect				55%

Sumber: (data diolah 2017)

Tabel di atas memberikan informasi mengenai hasil pengujian koefisien determinasi parsial antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan. Pada tabel di atas, terlihat bahwa secara parsial *Pendapatan Asli Daerah* memberikan pengaruh sebesar 37%, sedangkan *Belanja Modal* memberikan pengaruh sebesar 18%, sehingga total pengaruh yang diberikan keduanya adalah sebesar 55%.

4.1.2.6 Pengujian Hipotesis

a. Uji *t* (Parsial)

1) Pengujian Hipotesis Parsial antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Rumusan hipotesis parsial yang akan diuji adalah sebagai berikut:

Ho_1: $\beta_1 = 0$ Secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Ha_1: $\beta_1 \neq 0$ Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5%.

Kriteria pengujian:

1. Tolak Ho dan terima Ha jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ / $-t_{hitung} < -t_{tabel}$
2. Terima Ho dan tolak Ha jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ / $-t_{hitung} > -t_{tabel}$

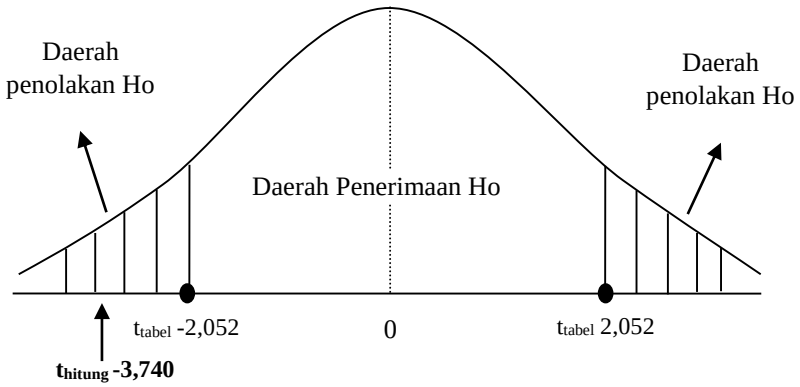
Mengacu pada tabel distribusi *t* dengan α = 5% dan *df* (30-2-1) = 27 untuk pengujian 2 pihak diperoleh nilai t_{tabel} sebesar ± 2.052. Dengan menggunakan program *SPSS* 23.0 diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4.18
Pengujian Hipotesis Parsial antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Model	t_{hitung}	$t_{tabel\ (0,05;27)}$	*Sig*	A	Keterangan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	-3.740	2,052	0,001	0,05	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: (data diolah 2017)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 3,740> $t_{tabel\ (0,05;27)}$ (2,052). Jika digambarkan ke dalam kurva pengujian hipotesis parsial, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} akan tampak seperti berikut:



Gambar 4.6
Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Pada gambar kurva pengujian hipotesis parsial di atas, terlihat bahwa nilai t_{hitung} berada di daerah penolakan Ho (t_{hitung} (-3.740) > t_{tabel} (-2,052)) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha yang berarti secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada SKPD kota Bandung.

2) Pengujian Hipotesis Parsial antara Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Rumusan hipotesis parsial yang akan diuji adalah sebagai berikut:

Ho_1: $\beta_1 = 0$ Secara parsial Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Ha_1: $\beta_1 \neq 0$ Secara parsial Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5%.

Kriteria pengujian:

3. Tolak Ho dan terima Ha jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ / $-t_{hitung} < -t_{tabel}$
4. Terima Ho dan tolak Ha jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ / $-t_{hitung} > -t_{tabel}$

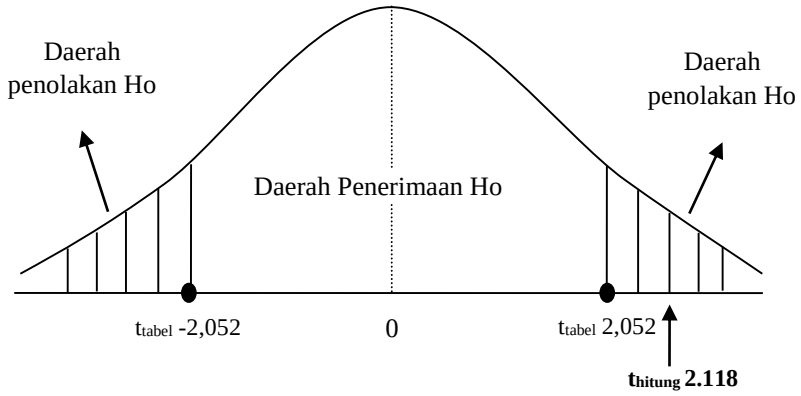
Mengacu pada tabel distribusi *t* dengan α = 5% dan *df* (30-2-1) = 27 untuk pengujian 2 pihak diperoleh nilai t_{tabel} sebesar ± 2.052. Dengan menggunakan program *SPSS* 23.0 diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4.19
Pengujian Hipotesis Parsial antara Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Model	t_{hitung}	$t_{tabel\ (0,05;27)}$	*Sig*	A	Keterangan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	2.118	2,052	0.37	0,05	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: (data diolah 2017)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 2.118> $t_{tabel\ (0,05;27)}$ (2,052). Jika digambarkan ke dalam kurva pengujian hipotesis parsial, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} akan tampak seperti berikut:



Gambar 4.7
Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Pada gambar kurva pengujian hipotesis parsial di atas, terlihat bahwa nilai t_{hitung} berada di daerah penolakan Ho (t_{hitung} (2.118) > t_{tabel} (2,052)) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha yang berarti secara parsial Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada SKPD kota Bandung.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan dengan Kinerja Keuangan arah negatif dan termasuk dalam kategori hubungan yang sedang. Nilai korelasi negatif menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi diantara keduanya adalah berlawanan arah, artinya semakin besar Pendapatan Asli Daerah, maka akan semakin kecil Kinerja Keuangan.

Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh sebesar sebesar 30.5% terhadap Kinerja Keuangan, sisanya sebesar 69.5% dipengaruhi oleh faktor lain seperti, arus kas bebas, arus kas pendanaan, pajak penghasilan, dan faktor-faktor lainnya yang memberikan pengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Selanjutnya hasil pengujian hipotesis uji t yang diperoleh menunjukkan bahwa H0 ditolak dikarenakan hasil uji thitung lebih besar dibandingkan dengan ttabel. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh secara signifikan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung periode 2011-2015.
Fenomena yang terjadi pada Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) pada beberapa tahun terakhir menunjukkan pada tahun 2013 total pendapatan sebesar Rp 978.654 terjadi kenaikan pada tahun 2014 menjadi Rp 2.435.759, tetapi hal tersebut menaikan rasio efisiensi pada tahun 2013 sebesar 2164,31% meningkat pada tahun 2014 sebesar 2362,42%. Hal itu menunjukan bahwa total pendapatan terjadi peningkatan diiringi dengan kinerja keuangan yang menurun, karena rasio efisiensi yang meningkat menunjukan tidak efisien nya penggunaan anggaran, karena rasio

efisiensi diatas 100% yakni sebesar 2362,42%. Hal ini terjadi Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memberikan pengaruh sebesar 37%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh hal hal lain yang tidak diteliti. Hal ini sesuai dengan teori menurut Sri Mulyani (2017:63) yang menyebutkan bahwa:

> "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Hal tersebut menunjukan, semakin besar PAD maka akan semakin tinggi kinerja keuangan yang diukur dari rasio efisiensi. Rasio efisiensi yang semakin tinggi mangidentifikasikan kinerja yang buruk".

Hal ini seiring pula dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Suprianto (2013) yang menyimpulkan secara umum PAD memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.dan penelitian dari Ebit, dkk (2012) yang menyebutkan pula bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.2.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki hubungan dengan Kinerja Keuangan arah positif dan termasuk dalam kategori hubungan yang rendah. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya dalah searah, artinya semakin tinggi Belanja Modal, maka semakin tinggi pula Kinerja Keuangan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sri Mulyani (2017:62) yang menyebutkan bahwa:

> "Semakin tinggi belanja modal maka akan semakin tinggi kinerja keuangan yang diukur dari rasio efisiensi. Rasio efisiensi yang semakin tinggi mangidentifikasikan kinerja yang buruk".

Belanja Modal memberikan pengaruh sebesar 18% terhadap Kinerja Keuangan dan sisanya sebesar 92% dipengaruhi oleh faktor lain, seperti Dana Perimbangan, Dan Alokasi Umum.

Fenomena yang terjadi pada Dinas Pemuda dan Olahraga menyebutkan bahwa total belanja modal pada tahun 2013 sebesar Rp 4.790.272 meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp 7.456.170, tetapi hal tersebut menaikan juga rasio efisiensi pada tahun 2013 sebesar 2164,31% meningkat pada tahun 2014 sebesar 2362,42%. Hal itu menunjukan bahwa total belanja modal meningkat tidak diiringi dengan kinerja keuangan yang meningkat pula, karena rasio efisiensi yang meningkat menunjukan tidak efisien nya penggunaan anggaran belanja, karena rasio efisiensi diatas 100% yakni sebesar 2362,42%.

Pada tahun 2014 total belanja modal sebesar Rp 7.456.170 meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp 51.871.768, tetapi hal tersebut menaikan juga rasio efisiensi pada tahun 2014 sebesar 2362,42% meningkat pada tahun 2015 sebesar 7573,69%. Hal itu menunjukan bahwa total belanja modal meningkat tidak diiringi dengan kinerja keuangan yang meningkat pula, karena rasio efisiensi yang meningkat menunjukan tidak efisien nya penggunaan anggaran belanja, karena rasio efisiensi diatas 100% yakni sebesar 7573,69%. Hal ini disebabkan Karena Belanja Modal Hanya Memberikan pengaruh sebesar 18% terhadap kinerja keuangan pada SKPD Kota Bandung.

Hasil pengujian hipotesis parsial antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan, terlihat bahwa t_{hitung} berada di daerah penolakan Ho (t_{hitung} (2.118) > t_{tabel} (2,052)) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho

dan Ha yang berarti secara parsial Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) penghasil di kota Bandung. Hasil uji tersebut dapat digeneralisasikan/diberlakukan umum pada anggota populasi secara keseluruhan.

Hasil penelitian yang dilakukan sama seperti yang dilakukan Ni Luh Putu, dkk (2015) menyatakan bahwa hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa belanja modal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan. Penelitian yang di lakukan oleh Mulia, dkk (2016) juga, berdasarkan hasil perhitungannya menunjukkan bahwa secara parsial variabel BM (Belanja Modal) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.